

PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DI DESA SEMUNTAI KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG

Oleh:
PASKALIS MULIYADI
NIM. E01108094

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email : Paskalis.134@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan fungsi manajemen dirasakan kurang optimal pada pelaksanaan PNPM-PISEW di Desa Semuntai oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa, Aparat Desa, BPD, serta Pokja Kecamatan. Kurang optimalnya fungsi manajemen yang dijalankan berupa kurang mampunya lembaga-lembaga tersebut di atas dalam merancang/merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, serta melakukan pengawasan kepada masyarakat sehingga berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan PNPM-PISEW di Desa Semuntai. Penelitian ini menggunakan teori manajemen G.R. Terry dengan menganalisis permasalahan menggunakan empat fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa, Aparat Desa, BPD, serta Pokja Kecamatan belum mampu mengelola PNPM-PISEW yakni dalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan serta mengawasi masyarakat pada setiap kegiatan sehingga berdampak pada kurangnya peran serta masyarakat pada proses pelaksanaan PNPM-PISEW di Desa Semuntai. Belum mampunya lembaga-lembaga tersebut diatas dalam mengelola suatu masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dikarenakan sumber daya manusia yang masih terbatas, kurangnya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta kurang terjalinnya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait. Maka dari itu, agar terciptanya suatu masyarakat yang mau berperan secara aktif dalam setiap proses kegiatan diperlukan kemampuan manajerial seorang pemimpin dalam hal ini lembaga-lembaga Desa terkait yakni Lembaga Kemasyarakatan Desa, Aparat Desa, BPD, serta Pokja Kecamatan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, baik fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap masyarakat.

Kata-kata Kunci : Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan, PNPM-PISEW.

Abstract

Implementation of management function perceived lack of optimal implementation for PNPM-PISEW at Semuntai village from village community institutions, village officials, BPD, and District Pokja. Less optimal management functions are executed in the from of an unqualified a forementioned institutions in designing, organizing, implementing, and monitoring to the public so the imfact on the lack of community participation in the implementation of the PNPM-PISEW at Semuntai village. The study uses the theory of management from G.R. Terry by analyzing the problem using the four functions namely management functions of planning, organizing, actuating, and controlling. The method used in this research is using qualitative research methods to the type of research in descriptive research. The result of this study indicate that village community institution, village officials, BPD, and District Pokja has not been able to manage PNPM-PISEW in planning, organizing, implementing, and overseeing the public on any activities that have an impact on the lack of public participation in the implementation process of PNPM-PISEW at Semuntai village. Not to inability of the abovementioned institutions in managing a society to participate actively because human resources are still limited, the lack of training given by the district and county governments, and the lack of established coordination between the relevant institutions. There for, to the creation of the public who want to actively participate in every process activity required managerial abilities of a leader in this institution related suchvillage community, village

officials, BPD, and District Pokja can carry out the functions of management, good planning function, organizing, implementation, and oversight of the public.

Keywords: Planning, Organizing, Execution, Monitoring, PNPM-RISE.

A. PENDAHULUAN

Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, pemerintah melakukan berbagai upaya guna mendorong terciapainya suatu masyarakat yang sejahtera. Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan, ini selaras dengan teori sumber daya manusia yang memandang mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya penduduk bukan beban suatu bangsa, bila mutunya tinggi, pembangunan dan perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan (Soetomo 2008:403).

Langkah yang dilakukan pemerintah salah satunya ialah dengan meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan masyarakat, mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dan tertinggal, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan hanya sebagai obyek melainkan sebagai subyek dalam penanggulangan kemiskinan.

Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang merupakan salah satu kecamatan yang ditetapkan sebagai lokasi program PNPM-PISEW. Hal ini sejalan dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi PNPM Mandiri di Kabupaten Sintang, kemudian ditetapkan 7 (tujuh) kecamatan sebagai sarana program dimaksud, meliputi : (a) Kecamatan Sintang, (b) Kecamatan Ketungau Tengah, (c) Kecamatan Ketungau Hilir, (d) Kecamatan Sepauk, (e) Kecamatan Binjai Hulu, (f) Kecamatan Kelam Permai, dan (g) Kecamatan Sungai Tebelian. Salah satu desa penerima PNPM Mandiri PISEW di Kecamatan Ketungau Hilir adalah Desa Semuntai. Desa Semuntai ditetapkan sebagai salah satu Desa penerima PNPM-PISEW dikarenakan

kondisi geografis dan kondisi infrastruktur yang masih dianggap belum memadai sehingga berdampak pada perkembangan tingkat ekonomi yang masih belum terlalu berkembang.

Di Desa Semuntai peneliti menelaah adanya indikasi-indikasi permasalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan PNPM-PISEW. Indikasi-indikasi tersebut diantaranya adalah masih kurangnya peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan program-program kegiatan dari PNPM-PISEW baik itu mulai dari tahap perencanaan maupun sampai kepada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan. Hal tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari keluhan-keluhan serta berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Semuntai. Kurangnya keikutsertaan masyarakat secara aktif pada setiap proses pelaksanaan berbagai program terindikasi disebabkan oleh kurangnya peran dari pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah daerah yakni pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa serta tokoh masyarakat dalam memanager masyarakat pada setiap proses pelaksanaan kegiatan PNPM-PISEW.

Fokus dari penelitian ini adalah menekankan pada bagaimana Pelaksanaan Fungsi Manajemen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial

Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di Desa Semuntai Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Desa, aparat Desa, BPD serta tokoh masyarakat dan Pokja Kecamatan dalam menjalankan fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan guna membangun partisipasi masyarakat pada pelaksanaan PNPM-PISEW di Desa Semuntai.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Manajemen

Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya para anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kaitannya dengan partisipasi adalah bahwa manajemen sebagai suatu konsep dengan fungsinya masing-masing untuk menciptakan ataupun mengerakan orang atau suatu masyarakat agar berpartisipasi dalam sebuah pelaksanaan setiap kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

G. R. Terry (dalam Amirullah dan Haris Budiyo 2004:14), berpendapat

bahwa manajemen merupakan proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. R. Terry juga menyebutkan ada empat fungsi manajemen dalam pencapaian tujuan, yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling atau yang biasa kita kenal dengan istilah POAC. Dari pendapat yang dikemukakan oleh R. Terry menekankan bahwa ada fungsi yang sangat penting yang diperankan oleh fungsi manajemen dalam pencapaian suatu tujuan. Fungsi-fungsi manajemen itulah yang nantinya akan menjadi suatu pedoman dilaksanakannya setiap kegiatan tahap demi tahap dalam proses pencapaian suatu tujuan.

Teori R. Terry juga menjadi teori utama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yang mana pada teori ini menjelaskan tentang fungsi dari manajemen dalam pencapaian tujuan. Artinya bahwa, untuk menciptakan atau mendorong suatu masyarakat yang partisipatif diperlukan sebuah konsep serta tahapan dimana konsep tersebut dapat menjadi tolak ukur atau pedoman dalam proses pencapaian tujuan seperti yang dikemukakan oleh R. Terry.

2. PNPM Mandiri (PISEW)

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

- a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Berbicara tentang pemberdayaan, menurut Wardhani dan Haryadi, (2004:5) pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat miskin agar mampu mengakses berbagai sumber daya, permodalan, teknologi, dan pasar dengan pendekatan pendampingan, peningkatan kapasitas pelayanan dan pembelaan menuju kemandirian masyarakat.

Sejalan dengan itu, ada beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Wardhani dan Haryadi (2004:5) yakni :

- a. Pemberdayaan ekonomi yang berakar pada rakyat dan menuju kemandirian masyarakat.
- b. Tata sosial yang berkeadilan dan memihak rakyat.
- c. Pengembangan SDM yang berkualitas.
- d. Kelembagaan yang dimiliki masyarakat dari, oleh dan untuk masyarakat.
- e. Tata politik yang demokratis dan partisipatif.
- f. Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
- g. Tata nilai pluralistik dan yang berkesetaraan gender.

Sementara itu pelaksanaan PNPM Mandiri dilakukan pada awal tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program

pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik.

Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sector dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 23/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007, pelaksanaan PNPM Mandiri-PISEW menekankan prinsip-prinsip pokok , yang terdiri dari :

- a. Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan

- dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legasl maupun administrative.
- b. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
- c. Keberpihakan pada Orang/ Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- d. Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- e. Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
- f. Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- g. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
- h. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- i. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dari beberapa uraian dan pendapat para ahli tentang PNPM Mandiri mengenai tujuannya serta kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dapat ditarik kesimpulan bahwa PNPM-PISEW merupakan upaya pemerintah dalam memerangi dan menanggulangi kemiskinan dengan upaya memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada. Pemberdayaan itu sendiri berupa tindakan masyarakat yang ikut serta berperan aktif dalam proses pembangunan perekonomian dan nilai-nilai sosial dimana semuanya itu dilakukan dengan prinsip-prinsip

demokrasi yang adil dan memihak kepada masyarakat

Berdasarkan hasil dari telaah masalah pada pembahasan sebelumnya, pada pelaksanaan fungsi manajemen PNPM-PISEW di Desa Semuntai, ditemukan indikasi bahwa lembaga-lembaga terkait yang berkompeten dalam menjalankan fungsi manajemen dalam upaya membangun partisipasi masyarakat masih dirasakan kurang maksimal, baik itu pada fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan.

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka peneliti menggunakan teori G.R. Terry dengan empat fungsi manajemennya yang biasa dikenal dengan POAC untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi. Dalam teori yang dikemukakan oleh G.R. Terry, menjelaskan ada empat fungsi dalam manajemen, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan.

Gambar 1

Alur Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini dilakukan dengan maksud penulis ingin memperoleh gambaran dan fenomena yang terjadi berkenaan dengan pelaksanaan fungsi manajemen PNPM-PISEW di Desa Semuntai. Dengan menggunakan metode ini dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan memahami serta mendapatkan deskripsi, gambaran atau

lukisan secara sistematis dan akurat mengenai data dan fakta serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diteliti.

Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis dengan metode kualitatif. Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan penulis dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Ini selaras dengan pendapat Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008:246-253), yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut antara lain, Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Verifikasi (*Verification/conclusion drawing*).

Uji validasi pada penelitian ini dilakukan penulis dengan cara triangulasi data. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Ketua Pokja Kecamatan, Kepala Desa, BPD serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Semuntai.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Fungsi Manajemen PNPM-PISEW di Desa Semuntai

1) Fungsi Perencanaan (Planning)

Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya menentukan sebelumnya apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana strategi dan teknik melakukannya. Fungsi perencanaan dilakukan pada tingkat kecamatan dan desa dengan melakukan persiapan tahap awal sebelum kegiatan PNPM-PISEW itu dilaksanakan. Persiapan tersebut meliputi sosialisasi kepada masyarakat dan membentuk kelompok diskusi di masyarakat. Kelompok diskusi tersebut dibentuk dan dirancang dengan maksud agar menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan usulan-usulan dan gagasan mereka tentang pembangunan apa yang mereka inginkan. Pada kenyataannya, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Aparat Desa, BPD, serta Pokja Kecamatan pada tahap awal kegiatan masih belum mampu mengelola ataupun menciptakan kondisi masyarakat yang secara sadar mau berperan aktif dalam proses perencanaan. Itu terbukti dengan situasi rapat atau diskusi yang terkesan kaku, masyarakat takut dan malu untuk menyampaikan ide-ide serta gagasan mereka berkaitan dengan usulan-usulan yang mereka inginkan di daerah mereka. Hal tersebut berakibat pada

kurang tepatnya program-program yang dilaksanakan karena kurang mewakili aspirasi dari semua masyarakat sehingga masyarakat kurang mau terlibat secara aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan dari beberapa program yang ada.

Lembaga Masyarakat dalam hal ini diwakilkan oleh BPD, tokoh masyarakat dan ketua KDS (Kelompok Diskusi Sektor) seharusnya harus mampu memanager para anggotanya yaitu masyarakat dalam setiap diskusi yang dilakukan. Suasana diskusi harus dibuat sedemikian rupa serta pendekatan-pendekatan yang dilakukan harus kepada masyarakat harus dibuat santai agar tidak tegang, sehingga masyarakat tidak segan ataupun takut dalam menyampaikan ide ataupun gagasan dalam diskusi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Waluyo (2007:4) tentang manajemen. Ia mengemukakan manajemen adalah kekuatan yang mempersatukan berbagai unsur untuk produksi, bahan mentah, pekerja, alat, dan kecakapan teknik. Para manajer harus memainkan peranan penting dalam perubahan sosial di masa depan. Manajemen di sini diartikan sebagai kekuatan yang mampu mengkolaborasikan berbagai sumber daya yang ada untuk melakukan sebuah usaha dalam pencapaian tujuan.

2) Fungsi Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian dapat diartikan sebagai proses perintah, pengalokasian dan pengaturan suatu kegiatan secara terkoordinir oleh individu ataupun kelompok untuk menerapkan rencana. Pengorganisasian merupakan penerapan segala sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Fungsi pengorganisasian pada pelaksanaan PNPM-PISEW merupakan tindak lanjut dari hasil perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Di Desa Semuntai, pengorganisasian dilakukan oleh Lembaga Desa/BPD yang dibantu oleh Fasilitator Desa dengan mengorganisir masyarakat ke dalam bentuk kelompok-kelompok kerja. Itu dimaksudkan agar dalam proses pelaksanaan setiap kegiatan masyarakat dapat teratur dan terorganisir dengan baik. Kelompok-kelompok tersebut adalah KDS yaitu berkenaan dengan tahap awal kegiatan sebagai wadah bagi masyarakat mendiskusikan usulan-usulan, LKD berkenaan dengan tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dan KPP yang terdiri dari masyarakat pemanfaat atau pengguna fasilitas yang telah dibangun.

Pada pelaksanaannya, fungsi pengorganisasian yang dijalankan oleh Lembaga Desa/BPD dan Fasilitator Desa dirasakan masih kurang baik. hal tersebut terbukti dengan masih belum terarahnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh

anggota masyarakat yang disebabkan kurangnya arahan serta bimbingan dari Ketua-ketua Lembaga yang ada. Hal tersebut disebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut diatas dalam mengkoordinasikan setiap informasi-informasi maupun rencana kegiatan kepada anggotanya, sehingga anggota-anggota dari Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk kurang dapat berpartisipasi secara baik karena kurang mendapat arahan yang jelas dari ketua kelompok mereka tentang apa saja yang menjadi tugas yang harus dikerjakan oleh para anggota kelompok.

Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada seharusnya diberikan pelatihan-pelatihan maupun bimbingan oleh Pokja Kecamatan serta Fasilitator Kecamatan berkenaan dengan tugas dan fungsi mereka sebagai ketua, serta diberikan pemahaman teknis dan administratif agar dapat berkoordinasi dengan para anggotanya serta Lembaga terkait lainnya, sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan dapat terarah dan terkoordinasi dengan baik. Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Waluyo (2007:4), yang mengemukakan manajemen merupakan kekuatan yang mempersatukan berbagai unsur untuk produksi, bahan mentah, pekerja, alat, dan kecakapan teknik. Para manajer harus memainkan

peranan penting dalam perubahan sosial di masa depan. Manajemen di sini diartikan sebagai kekuatan yang mampu mengkolaborasikan berbagai sumber daya yang ada untuk melakukan sebuah usaha dalam pencapaian tujuan. Artinya bahwa, seorang ketua Lembaga Kemasyarakatan serta Lembaga terkait lainnya harus mempunyai kekuatan yang mampu mengorganisir dan mengarahkan para anggotanya untuk melaksanakan suatu kegiatan secara baik dan terarah.

3) Fungsi Pelaksanaan (Actuating)

Fungsi pelaksanaan pada tahapan manajemen adalah berkenaan dengan bagaimana segala sesuatu yang telah direncanakan dan kemudian perencanaan itu diorganisir barulah kemudian sampai kepada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, tentunya fungsi pelaksanaan berperan dalam memantau dan menggerakkan elemen ataupun komponen yang telah dibentuk sebelumnya yaitu pada tahap perencanaan dan pengorganisasian.

Fungsi pelaksanaan pada PNPM-PISEW di Desa Semuntai berkenaan dengan bagaimana suatu masyarakat yaitu kelompok-kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya yakni lembaga-lembaga kemasyarakatan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan jenis program kegiatan yang diusulkan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dari PNPM-PISEW di Desa Semuntai secara umum sudah berjalan cukup baik jika dilihat dari hasil infrastruktur yang telah dibangun. Namun demikian jika ditinjau dari bagaimana proses pelaksanaannya, fungsi pelaksanaan yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini adalah ketua LKD masih belum berjalan baik. Hal tersebut terlihat dengan kurang mampunya seorang ketua LKD dalam memanager dan menggerakkan para anggotanya dalam pelaksanaan setiap kegiatan, sehingga pada kenyataannya yang mau terlibat secara aktif adalah hanya sebagian dari anggota.

Kurangnya keterlibatan anggota secara keseluruhan dikarenakan ketua LKD dianggap telah mengecewakan para anggotanya dengan mencampur adukan urusan pribadi dengan kepentingan kelompok yaitu dengan adanya penyelewengan anggaran yang seharusnya untuk keperluan kelompok malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi ketua dan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan para anggota dari kelompok kerjanya.

Seharusnya seorang pemimpin dalam hal ini adalah ketua-ketua Lembaga Kemasyarakatan yang ada memimpin para anggotanya (masyarakat) untuk berperan secara aktif guna tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya telah ditentukan tentu

diperlukan kemampuan manajerial yang baik sehingga ia mampu memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk pencapaian suatu tujuan. Ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mary Parker Follet (dalam Waluyo, S.sos, M. Si. 2007:5), manajemen telah di beri batasan sebagai seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang (*the art of getting things done through people*). Kenyataannya adalah manajer mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk menjalankan tugas-tugas apapun yang perlu, bukan dengan menjalankannya sendiri tugas-tugas tersebut. Dalam hal ini manajemen berarti bagaimana seorang atasan dapat mengatur atau mengendalikan orang lain dalam pelaksanaan tugas mereka masing-masing untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya ini berkenaan dengan bagaimana seorang atasan atau manager mampu memimpin bawahannya dalam pelaksanaan berbagai tugas mereka untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

4) Fungsi Pengawasan (Controlling)

Fungsi pengawasan adalah berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan suatu kegiatan di kontrol dan diawasi agar sesuai dan tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan perlu dilakukan agar pelaksanaan kegiatan merasa ada sebuah

tanggung jawab dari apa yang dikerjakannya.

Fungsi pengawasan pada pelaksanaan PNPM-PISEW di Desa Semuntai dilakukan berupa adanya pelaporan dari setiap kegiatan. Pelaporan tersebut baik berupa hasil kegiatan maupun berupa pelaporan keuangan yang diserap pada setiap pelaksanaan program.

Secara umum fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Desa serta Lembaga Kecamatan yang terkait sudah berjalan cukup baik yaitu dengan melakukan pemeriksaan dari hasil kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada. Namun demikian pemeriksaan hanya berupa menerima laporan saja dinilai masih kurang cukup, seharusnya fungsi pengawasan harus lebih banyak dilakukan dengan langsung turun kelapangan walaupun memang itu juga telah dilakukan, sehingga dengan demikian setiap proses kegiatan dapat terpantau secara baik dan jika terjadi permasalahan-permasalahan dilapangan dapat dengan cepat untuk segera ditangani.

Hal tersebut diatas selaras dengan pengetahuan manajemen yang disampaikan oleh Siswanto. Ia berpendapat bahwa manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi.

Sedangkan manajemen sebagai suatu seni adalah tentang keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (human and natural resources) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Artinya bahwa pengawasan perlu dilakukan untuk mengontrol setiap proses kegiatan yang ada guna mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka tentang bagaimana pelaksanaan fungsi manajemen PNPM-PISEW di Desa Semuntai, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada fungsi perencanaan, kurangnya peran serta masyarakat berupa kurang antusiasnya dan rasa malu dan takut mereka dalam menyampaikan ide-ide serta gagasan mereka tentang usulan apa saja yang mereka inginkan untuk dibangun. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kemampuan seorang Ketua KDS dalam menciptakan suasana diskusi yang santai serta kemampuan memanager masyarakat agar berani dan tidak malu dalam menyampaikan ide-

ide ataupun gagasan berkenaan dengan usulan-usulan pada diskusi yang dilaksanakan.

2. Pada fungsi pengorganisasian, kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan keterbatasan sumberdaya manusia, yakni kurang mampunya seorang ketua Lembaga Kemasyarakatan dalam menyampaikan hasil dari pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti berkenaan dengan pemahaman teknis dan administrasi kepada anggotanya (masyarakat), sehingga berpengaruh terhadap peran serta masyarakat pada setiap proses pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat cenderung hanya menunggu arahan dari ketua Lembaga mereka, tanpa berani bertindak kalau tidak diperintah oleh ketua yang sebenarnya itu bisa dilakukan tanpa harus diarahkan, sehingga berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan karena hanya bertumpu pada seorang ketua saja.
3. Fungsi pelaksanaan pada PNPM-PISEW di Desa Semuntai yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa dirasakan masih kurang maksimal. Hal tersebut dapat kita lihat dengan kurang mampunya seorang ketua LKD dalam mengarahkan dan menggerakkan anggotanya yaitu masyarakat dalam pelaksanaan dari

program pembangunan infrastruktur yang ada. Ketidakmampuan tersebut berupa tidak mampunya seorang ketua LKD dalam membedakan kepentingan kelompok dan keperluan pribadi sehingga terjadi gesekan kepentingan yang menyebabkan rasa kecewa dari masyarakat yang berujung kepada kurangnya kemauan masyarakat untuk melaksanakan program yang dilaksanakan.

4. Pelaksanaan fungsi pengawasan pada PNPM-PISEW di Desa Semuntai sudah berjalan cukup baik yaitu dilakukan dengan pembuatan laporan dari setiap kegiatan oleh masyarakat melalui wadah kelompok-kelompok kerja yang ada. Laporan-laporan tersebut berupa dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan, daftar hadir warga pada pelaksanaan kegiatan serta laporan rincian penggunaan anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada.

F. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis pada penelitian ini adalah untuk membangun suatu masyarakat yang partisipatif dalam setiap proses kegiatan pembangunan, diperlukan seseorang ataupun suatu lembaga yang

mampu menjalankan fungsi manajemen secara baik. Seorang pemimpin dalam hal ini adalah lembaga-lembaga terkait harus mengelola masyarakat secara baik. Masyarakat dirancang/dipersiapkan dengan perencanaan-perencanaan yang matang, diorganisir agar dapat melaksanakan kegiatan dengan terarah, serta diberikan kontrol ataupun pengawasan agar dalam setiap proses kegiatan muncul rasa tanggungjawab mereka sehingga suatu kegiatan pembangunan dapat berjalan secara baik dengan melibatkan masyarakat sepenuhnya.

G. REFERENSI

1. Buku-Buku

Budiyono, Haris & Amirullah. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : GRAHA ILMU.

Dr. Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill Pada Keluarga Nelayan)*. Bandung : Alfabeta.

Gitosudarmo dan Mulyono. 2001. *Prinsip Dasar Manajemen*. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta.

Isukindo. 2004. *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*. Yogyakarta: FE UGM.
Kaho, R.Josef. 1986. *Ilmu Sosial Dasar (Kumpulan Essai)*. Surabaya : Penerbit Usaha Nasional.

Moleong, J. Lexi. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muluk, M.R Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Otonomi Daerah*. Bayumedia, Malang.

Siagian, P. Sondang. 2003. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Siswanto, H.B. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelangi.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tohardi, Ahmad. 2002. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Mansia*. CV. Mandar Maju, Jakarta.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV Mandar Maju.

Wardani, dan Haryadi. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Komite Penanggulangan Kemiskinan.

2. Sumber Lain :

Perpres No.15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 23/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007.

Keputusan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi PNPM Mandiri di Kabupaten Sintang.Buku Panduan Teknis Pemberdayaan Masyarakat PNPM-PISEW tahun 2013

Buku Panduan Teknis Pelaksanaan PNPM-PISEW tahun 2013

3. Skripsi :

Yeri Susanto T. 2011. *Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ta'as Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak*. Pontianak : Magister FISIP UNTAN.

Imus. 2011. *Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Perdesaan Di Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang*. Pontianak : Magister FISIP UNTAN.





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : PASKALIS MULIYADI
 NIM / Periode lulus : E.011.08.094 / 2015/2016 Periode III
 Tanggal Lulus : 8 MARET 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIPOL / ILMU ADMINISTRASI
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 E-mail address/ HP : Paskalis.134@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Publika* *) pada Program Studi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT MANDIRI DI DESA SEMUNTAI KECAMATAN KETUNGAU HILIR
 KABUPATEN SIKTANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltex*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal

 Dr. H. Arif M. AB
 NIP. 1971050219977021002

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 4 Mei 2016

 PASKALIS MULIYADI
 NIM. E 011 08 094

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)